

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

##### **3.1.1 Sejarah singkat mengenai PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.**

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak.

Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “*value*” pada setiap karyanya.” Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik

Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadiperusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga

menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak: Bank BNI Syariah, BNI Multi Finance, BNI Securities dan BNI Life Insurance. Pada akhir tahun 2012, BNI memiliki total aset sebesar Rp333,3 triliun dan mempekerjakan lebih dari 24.861 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.585 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 8.227 unit ATM milik sendiri, 42.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking. BNI selalu berusaha untuk menjadi bank pilihan yang menyediakan layanan prima dan solusi bernilai tambah kepada seluruh nasabah. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

### 3.1.2 Visi dan Misi

#### 1. Visi BNI

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja

##### **Pernyataan Visi**

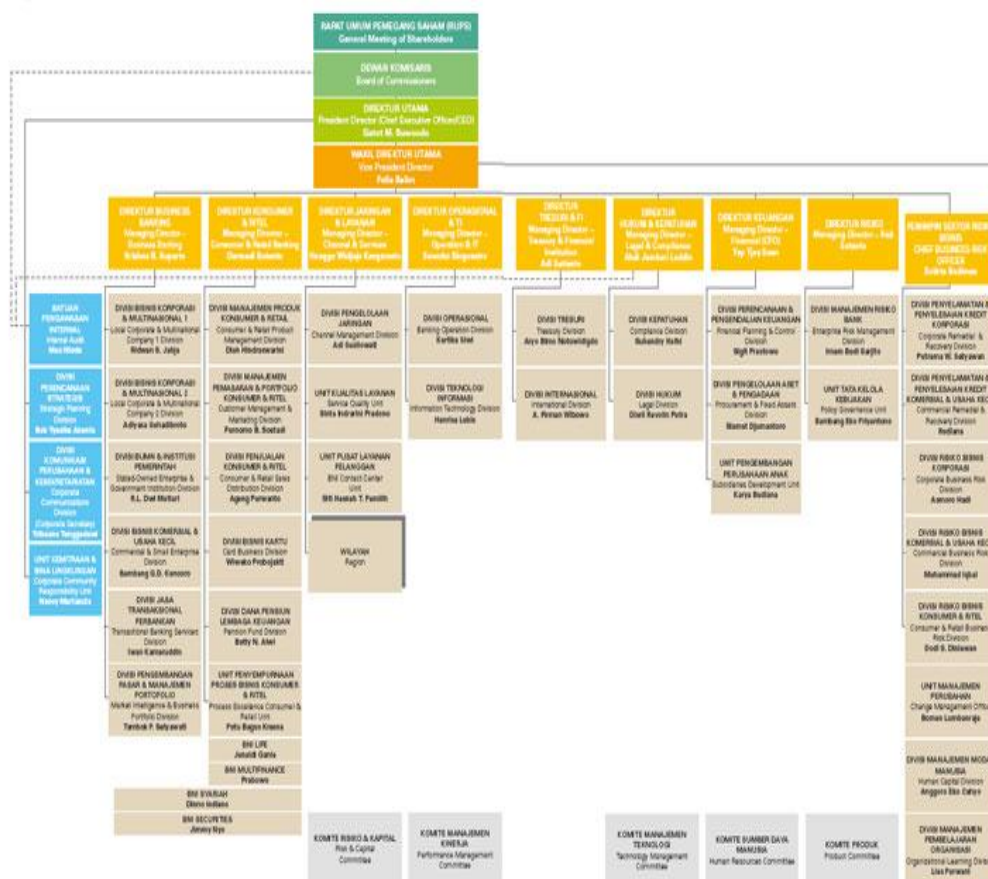
BNI berupaya menjadi Bank yang menunjukkan kinerja unggul untuk memberikan nilai investasi yang memuaskan bagi para pemegang saham, menjadi *the bank of choice* dengan menyajikan kualitas layanan yang terbaik, serta menjadi *dominant player (market leader)* dengan menyajikan produk/jasa bernilai tinggi di segmen pasar yang dilayani

#### 2. Misi BNI

- 1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (*the bank choice*)
- 2) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- 3) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 5) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.



Struktur organisasi BNI secara keseluruhan menunjukkan adanya fungsi keterikatan satu sama lain. Fungsi ini memungkinkan atasan membuat keputusan-keputusan penting yang akan dilaksanakan bawahannya dan memungkinkan pelaksanaan pola pertanggung jawaban antara atasan dan bawahan. Adapun bentuk struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:



Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (<http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/strukturorganisasi/struktur.aspx>) di unduh pada tanggal 30 oktober 2013)

### **3.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus**

Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus hanya untuk tingkat dewan komisaris dan direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut.

#### **3.1.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BNI oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi.
3. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BNI, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BNI.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BNI disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
5. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.

6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
7. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, antara lain untuk melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik BNI yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris atau mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Built, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

#### 3.1.4.2 Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Adapun secara garis besar, pelaksanaan tugas tersebut meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui:
  - 1) Evaluasi kinerja keuangan atau realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) setiap bulan.
  - 2) Evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.
  - 3) Evaluasi atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.
  - 4) Evaluasi atas *internal control* atau Satuan Pengawasan Intern setiap tahun.
  - 5) Evaluasi posisi dan perkembangan risiko BNI setiap tahun.
  - 6) Konsultasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu.
  - 7) Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan lain-lain.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB.
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, antara lain dengan meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit



dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern dan auditor eksternal (Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau otoritas lainnya), baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris tidak melakukan pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional, kecuali yang diwajibkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki "Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi" yang bersifat mengikat, yang terus dievaluasi dan di *up-date* untuk disempurnakan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dengan penjelasan dalam sub komite-komite pada bagian Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dari Laporan Tahunan ini.

#### **3.1.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mengelolanya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BNI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus tugas dan wewenang Direksi diatur terperinci dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota

Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membentuk Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*);
6. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan di pertanggung jawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-

- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
9. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
  10. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
  11. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
  12. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
  13. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
  14. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
  15. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

16. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri;
17. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
18. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
19. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
20. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
21. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;



22. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

23. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengelola Perseroan, tindakan Direksi senantiasa dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG, etika bisnis serta prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi telah membentuk *Corporate Secretary*, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Kepatuhan serta Komite-komite dibawah Direksi. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada pemegang saham dilaksanakan setiap tahun melalui forum RUPS. Di tahun 2011 Direksi telah menata kembali organisasi Direksi dan Chief Business Risk Officer melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KP/325/DIR/R tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penataan Organisasi Direksi BNI, dengan pembagian bidang tugas yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan usaha BNI, sebagai berikut:

1. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis serta Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan.
2. Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Change Management Office, Human Capital* dan *Organizational Learning*.
3. Direktur Business Banking bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Korporasi, Jasa Keuangan & Dana Institusi, *transactional Banking & Financial Service*, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil.
4. Direktur Konsumer & Ritel bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Product Management, Customer Management & Marketing, Consumer & Retail Sales Distribution*, Bisnis Kartu, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan *Process Excellence*.
5. Direktur Jaringan & Layanan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Jaringan & Layanan, Wilayah, *Service Quality*, dan *Contact Center*.

6. Direktur Operasional dan Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Operasional dan Teknologi Informasi.
7. Direktur Tresuri & Financial Institution bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Tresuri dan Internasional.
8. Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Kepatuhan dan Hukum.
9. Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengendalian Keuangan, Umum, Pengembangan Perusahaan Anak.
10. Direktur Enterprise Risk Management bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang *Enterprise Risk Management dan Policy Governance.*

### **3.1.5 Kegiatan Usaha**

Guna meningkatkan pelayanannya kepada para nasabah, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berusaha terus menerus meningkatkan pelayanan dan menambah produk guna memenuhi semua kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan

jasa yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terbagi menjadi 2 jenis segmentasi yaitu individu dan bisnis. Jasa-jasa tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Individu

1) Penghimpuna dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- (1) Giro Deposito
- (2) Tabungan
- (3) Tabungan Bisnis
- (4) Tabungan Pendidikan
- (5) Kartu Debet

2) Penyaluran dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang terjadi dari:

- (1) KPR - BNI
- (2) BNI OTO
- (3) BNI Multiguna
- (4) BNI Fleksi
- (5) BNI Instan
- (6) Kartu Kredit
- (7) Kredit TKI
- (8) Kredit Usaha Kecil

3) Produk Jasa dan Layanan yang ditawarkan terdiri dari:

(1) *Tresuri*

a. *Foreign Exchange*



- b. Fixed Income*
- c. Money Market*
- d. Banknotes*

(2) Layanan

- a. ATM
- b. Phone Banking*
- c. SMS Banking*
- d. Internet Banking*
- e. Layanan Prima
- f. Pembayaran
- g. Kiriman Uang Domestik
- h. Kiriman Uang International
- i. OveCek Multi Guna
- j. Cek Perjalanan
- k. Inkaso
- l. ONH
- m. Referensi Bank
- n. Safe Deposits Box*
- o. Uang Kertas Asing
- p. BNI Layanan Gerak

2. Bisnis

- 1) Penghimpuna dana, dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- (1) Debit Card

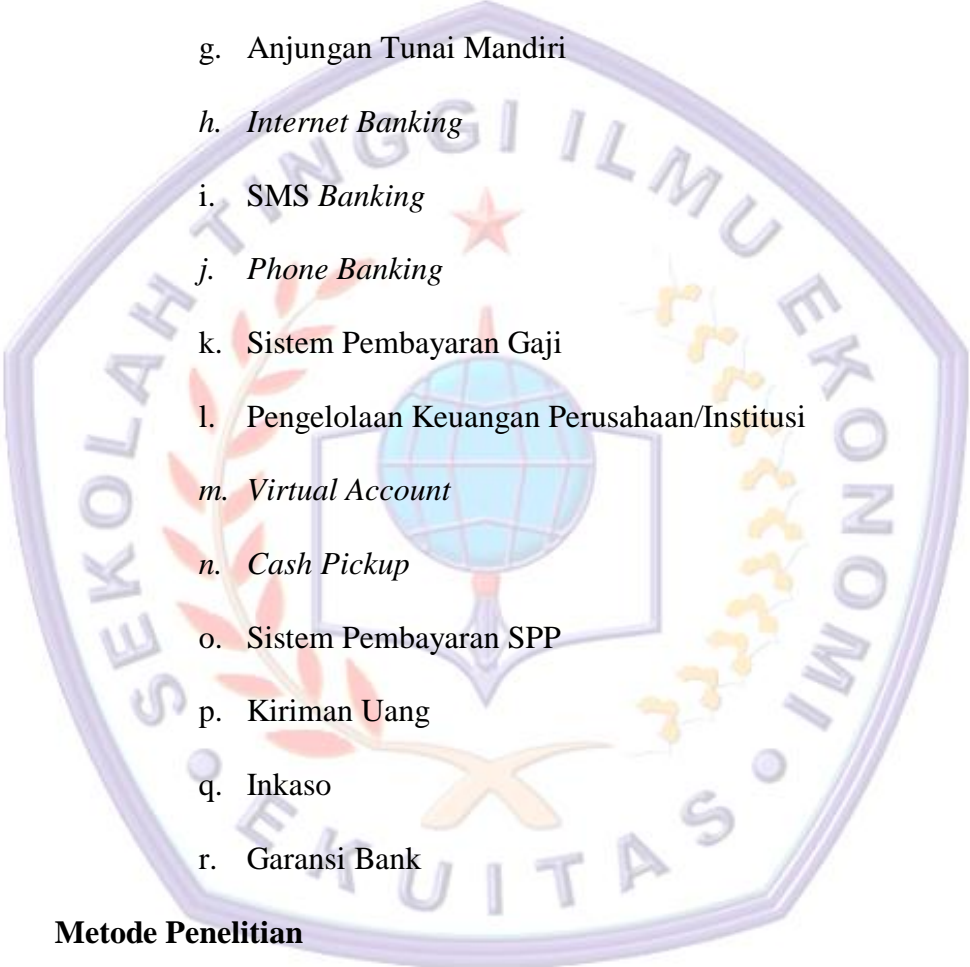
- (2) DPLK
- (3) Giro
- 2) Penyaluran dana, terutama dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan untuk berbagai jenis dan sektor usaha yang terjadi dari:
  - (1) Kredit Penerusan
  - (2) Cash Collateral Credit
  - (3) Kartu Kredit
  - (4) Kredit Ekspor
  - (5) Kredit Impor
  - (6) Kredit Investasi
  - (7) Kredit Koperasi Primer
  - (8) Kredit Modal Kerja
  - (9) Kredit Sindikasi
- 3) Produk Jasa dan Layanan yang ditawarkan terdiri dari:
  - (1) *Tresuri*
    - a. *Foreign Exchange*
    - b. *Fixed Income*
    - c. *Money Market*
    - d. *Bank notes*
  - (2) Layanan
    - a. *Advisory*
    - b. Agen Pembayaran
    - c. *Arranger* Sindikasi
    - d. Inkaso

- e. *Commercial Paper*
- f. Ekspor
- g. *Escrow Agent*
- h. *Facility Agent*
- i. Bank Garansi
- j. Impor
- k. Infonas
- l. *Investment Services*
- m. Jasa Kustodi
- n. *Payment Centre*
- o. *Repo & Reverse Repo*
- p. *Security Agent*
- q. *Settlement Bank*
- r. *Sinking Fund*
- s. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

(3) Wali Amanat

- a. Pembiayaan
- b. Pembiayaan Investasi- Murabahah
- c. Pembiayaan Modal Kerja- Mudharabah
- d. Pembiayaan Modal Kerja- Musyarakah
- e. Pembiayaan Investasi- IMBT
- f. *Bank Guarantee*
- g. Qardhul Hasan

(4) *Tade Finance*

- 
- a. Layanan
  - b. Transfer/Kiriman Uang
  - c. Kliring
  - d. Jual-beli Valas
  - e. Kiriman Uang dari/ ke Luar Negeri
  - f. Cek
  - g. Anjungan Tunai Mandiri
  - h. *Internet Banking*
  - i. *SMS Banking*
  - j. *Phone Banking*
  - k. Sistem Pembayaran Gaji
  - l. Pengelolaan Keuangan Perusahaan/Institusi
  - m. *Virtual Account*
  - n. *Cash Pickup*
  - o. Sistem Pembayaran SPP
  - p. Kiriman Uang
  - q. Inkaso
  - r. Garansi Bank

### **3.2 Metode Penelitian**

#### **3.2.1 Metode yang digunakan**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Menurut Sugiono (2008:13) metode penelitian kuantitatif asosiatif dapat di jelaskan sebagai berikut:



“Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

“Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.”

Metode kuantitatif asosiatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode deskriptif.

Menurut Husein (2005:55) bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta atau kejadian yang ada dan kemudian diolah menjadi data dan selanjutnya diadakan suatu analisis yang pada akhirnya akan menghasilkan hipotesa. Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Metode verifikatif.

Menurut Husein (2005:55) bahwa metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesa. Dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini yaitu data yang terkait dengan *Non Performing Loan* dan cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode

verifikatif digunakan untuk menguji lebih dalam tentang pengaruh *Non Performing Loan* dan cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

### 3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:58), variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu pengaruh *Non performing loan* terhadap cadangan penghapusan piutang pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maka dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yang perlu di operasionalisasikan, yaitu :

1. Variabel Independen (X).

Variabel Independen adalah variabel yang identik dengan variabel bebas, penjelas dan biasanya dianggap sebagai variabel penyebab dari variabel dependen (Kuncoro, 2009:24). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non performing loan*.

2. Variabel Dependen (Y).

Variabel dependen adalah variabel yang identik dengan variabel terikat, (Kuncoro, 2009:23). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cadangan penghapusan piutang (CKPN).

Dari kedua variabel tersebut, indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut akan dijelaskan dalam bentuk Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

| Variabel                                                     | Konsep variable                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator                                                             | Skala |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Variabel X</b><br><br><i>Non Performing Loan (NPL)</i>    | Kredit bermasalah ( <i>Non Performing Loan</i> ) adalah kredit yang kolektibilitasnya dalam perhatian khusus ( <i>special mention</i> ), kurang lancar ( <i>sub standard</i> ), diragukan ( <i>doubtfull</i> ) dan kredit macet. (Rosmilia, 2009:132) | Perkembangan <i>Non Performing Loan (NPL)</i> tahun 2009-2013         | Rasio |
| <b>Variabel Y</b><br><br>Cadangan Penghapusan Piutang (CKPN) | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. (PAPI, 2008:178)                                                                      | Perkembangan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) tahun 2009-2013 | Rasio |

**Sumber: Rosmilia (2009) dan PAPI (2008)**

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan (*library research*).

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa teori-teori, konsep, dan informasi yang diperlukan sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara mempelajari buku-buku, literatur serta membaca laporan-laporan yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama beberapa periode yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang akan ditransformasikan sebagai variabel penelitian melalui *website* <http://www.bni.co.id/> dan <http://www.google.co.id/>.

### 3.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel penelitian terdiri dari:

1. Analisis data deskriptif variabel independen, yaitu *Non Performing Loan* (X).
2. Analisis data deskriptif variabel dependen, yaitu Cadangan Penghapusan Piutang (CKPN) (Y).

### 3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu diuraikan mengenai kondisi dari masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis statistik yang



digunakan untuk mengetahui lebih jauh pengaruh antara *Non performing loan* terhadap cadangan penghapusan piutang pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Untuk mempermudah pengolahan data, maka penelitian menggunakan bantuan *software* SPSS 20.

### 3.2.5.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiono (2008:270) regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Hal ini diperjelas oleh Purwanto (2009:469) bahwa:

“Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya.”

Dengan persamaan regresi ini, dapat diketahui prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen diubah-ubah. Secara umum persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Cadangan Penghapusan Piutang (CKPN)

a : Konstanta Intersepsi

b : Koefisien Regresi

X : *Non Performing Loan* (NPL)

### 3.2.5.2 Analisis Korelasi *Pearson*

Menurut Sarwono (2006:37) bahwa analisis koefisien korelasi *Pearson* digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel tergantung.

Jadi korelasi *Pearson* digunakan untuk mengukur seberapa kuatnya *Non Performing Loan* (NPL) terhadap cadangan penghapusan piutang (CKPN) dengan formulasi sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Sumber: Andi Supangat (2006:351)

Dimana :

r = Nilai Koefisien Korelasi

n = Banyaknya data

$\sum x$  = Variabel bebas (x)

$\sum y$  = Variabel terikat (y)

$\sum xy$  = Jumlah hasil perkalian variabel x dan variabel y

Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau negatif (-). Jika korelasi menghasilkan angka positif (+), hubungan kedua variabel yaitu *Non Performing Loan*(X) dan cadangan penghapusan piutang (CKPN) (Y) bersifat searah yang artinya jika *Non Performing Loan* naik/meningkat maka cadangan penghapusan piutang (CKPN) pun akan mengalami kenaikan/peningkatan. Jika korelasi menghasilkan angka yang negatif (-), hubungan kedua variabel yaitu *Non Performing Loan*(X) dan cadangan penghapusan piutang (CKPN) (Y) bersifat

tidak searah yang artinya jika *Non Performing Loan* naik/meningkat maka cadangan penghapusan piutang (CKPN) akan mengalami penurunan. Angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua variable, dengan menggunakan Interpretasi Koefisien Korelasi. Fungsinya seperti pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Interprestasi Koefisien Korelasi**

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199       | Sangat Rendah    |
| 0,20 – 0,399       | Rendah           |
| 0,40 – 0,599       | Sedang           |
| 0,60 – 0,799       | Kuat             |
| 0,80 – 1,00        | Sangat Kuat      |

**Sumber :Sugiyono (2009:183)**

### 3.2.5.3 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Supangat (2006;350) “Koefisien determinasi adalah merupakan ukuran (besaran) untuk menyatakan tingkat kekuatan hubungan dalam bentuk persen (%) besaran ini dinyatakan dengan notasi  $R$ . dimana  $R = r^2$ ”.

Jadi untuk mengetahui seberapa persen besarnya hubungan antara *Non Performing Loan* (NPL) (X) dengan cadangan penghapusan piutang (CKPN) (Y) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk maka menggunakan analisis Koefisien Determinasi yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Sarwono (2006:42)

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

#### 3.2.5.4 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono (2009:159) yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Sedangkan menurut Supangat (2006:296) pengujian hipotesis adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari permasalahan yang akan ditelaah.

Adapun rancangan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### 1) Menentukan Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian, maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima dengan perumusan sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$ , *Non performing loan* (NPL) (X) tidak berpengaruh terhadap cadangan penghapusan piutang(Y)pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

$H_a : \rho \neq 0$ , *Non performing loan* (NPL) (X) berpengaruh terhadap cadangan penghapusan piutang(Y)pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2) Menetapkan Tingkat Signifikan

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka signifikan menurut Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan melakukan pengujian terhadap dua pihak. Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan = 5%.

3) Uji Hipotesis (uji t)

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien korelasi, maka penulis menggunakan statistik Uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

**Sumber: Supangat (2006:351)**

Dimana :

t = hasil uji tingkat signifikansi

r = koefisien korelasi

n = jumlah data



#### 4) Menentukan Kriteria Penerimaan Hipotesis

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui tingkat signifikan atau tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t ( $t_{hitung}$ ) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan  $t$  tabel. Tingkat signifikannya yaitu 5 % ( $\alpha = 0,05$ ), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada didaerah penolakan, berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel x dan variabel y ada pengaruhnya.
2. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada didaerah penerimaan, berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel x dan variabel y tidak ada pengaruhnya.